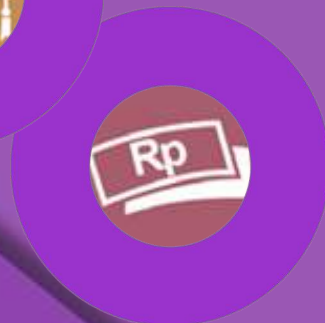


Katalog BPS : 4102002.3306

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO 2016



<https://purworejokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURWOREJO**

Katalog BPS : 4102002.3306

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PURWOREJO**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PURWOREJO 2016

No. Publikasi : 33060.1722
Katalog BPS : 4102002.3306

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : viii + 37 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Diterbitkan oleh :
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan,
mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau
seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembangunan manusia Kabupaten Purworejo. Selain itu, dapat juga dilihat capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo dari masing-masing dimensi.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo 2016” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Purworejo, Desember 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo



Drs. Wazirrudin

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
Bab 1. Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia	2
Konsep Dasar Pembangunan Manusia	3
Pengukuran Pembangunan Manusia.....	4
Bab 2. Status Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo	14
Bab 3. Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo ..	21
Bab 4. Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu	25
Kesenjangan Pembangunan Manusia.....	26
Kesenjangan Kesehatan.....	27
Kesenjangan Pendidikan.....	28
Kesenjangan Pengeluaran per Kapita	30
Kesimpulan	31
Lampiran	33

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 1.1	Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP	5
Gambar 1.2	Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	7
Gambar 2.1	IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2016	15
Gambar 2.2	Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo, 2010-2016	16
Gambar 2.3	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2010-2016 (Tahun)	17
Gambar 2.4	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2010-2016	19
Gambar 2.5	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2010-2016	20
Gambar 3.1	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2016	22
Gambar 3.2	Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2016	23
Gambar 4.1	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016	26
Gambar 4.2	Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016	27
Gambar 4.3	Perkembangan Selisih EYS Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016	28

Gambar 4.4	Perkembangan Selisih MYS Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016	29
Gambar 4.5	Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016	30

<https://purworejokab.bps.go.id>

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	34
Lampiran 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2010-2016	35
Lampiran 3. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP).....	36
Lampiran 4. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	37

<https://purworejokab.bps.go.id>

IPM KABUPATEN PURWOREJO 2016



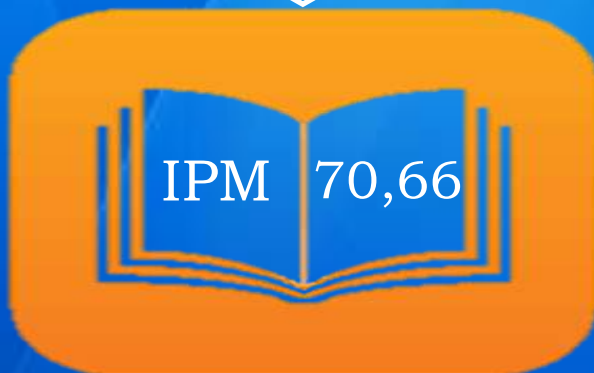
AHH
74,1
TAHUN



HLS | RLS
13,05 | 7,66
TAHUN | TAHUN



PENGELUARAN PER
KAPITA DISESUAIKAN
Rp 9.497.000/
ORANG/TAHUN



KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

<https://purworejo.bps.go.id>

Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia

Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia hakikatnya memiliki makna yang luas. Namun, ide dasar pembangunan manusia itu sendiri yaitu pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusianya. Ide dasar ini memiliki fokus kepada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Namun, hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Konsep pembangunan dan pembangunan manusia cukup berbeda. Dalam sudut pandang konvensional, pembangunan memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan pendapatan daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi dan sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia lebih memfokuskan kepada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, yang dilihat dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pengukuran Pembangunan Manusia

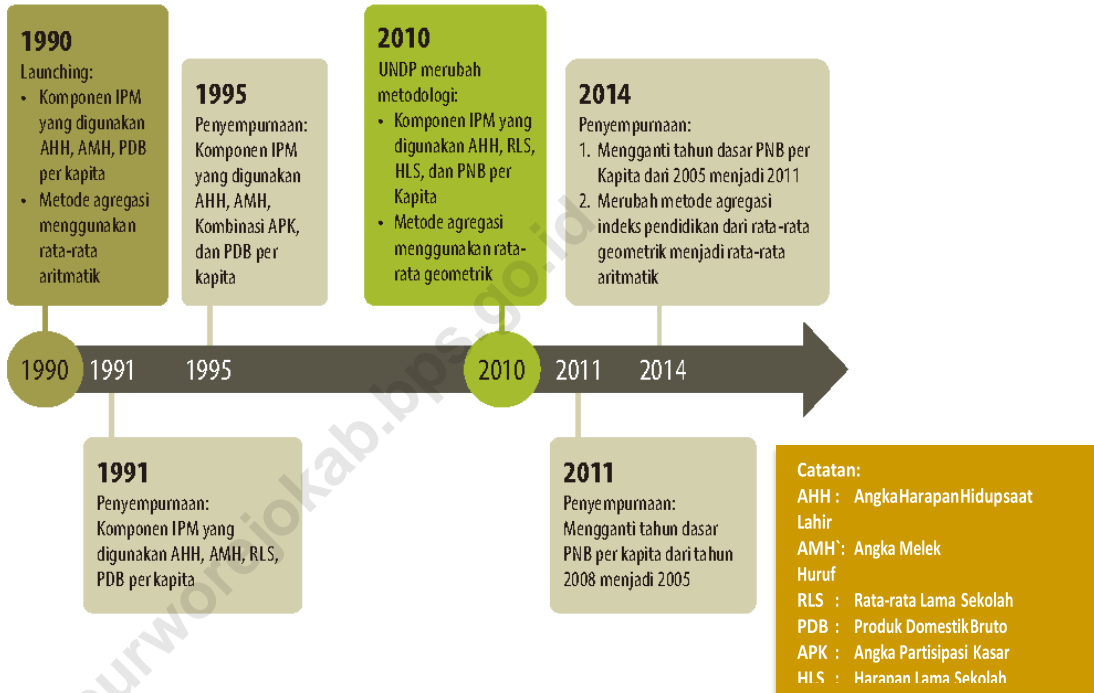
Perjalanan Penghitungan IPM

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan IPM sebagai indeks komposit yang dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diproksi dengan angka melek umur dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. UNDP memberi bobot untuk kedua indikator dalam dimensi pengetahuan tersebut. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan hingga tahun 2014. Namun akhirnya, pada tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama

sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Gambar 1.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar Gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2005. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Mengapa Metodologi Penghitungan IPM Dirubah?

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Namun, alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM setidaknya ada dua hal mendasar.

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan

pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Dengan kata lain, rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi lain yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

Apa Saja Yang Berubah?

UNDP memperkenalkan penghitungan metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Gambar 1.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak Negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Bagaimana Dampaknya?

Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru tersebut, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010 / SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional / SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Selain sumber utama tersebut, digunakan juga data pendukung seperti inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ekonomi lainnya. Selain itu, Indonesia juga melakukan penyesuaian terhadap metode baru yaitu pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Dalam proses penghitungan IPM dan komponennya, digunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir

AHH yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan AHH melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Micro Computer Program For Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS, 2016).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum

dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas karena disesuaikan dengan program wajib belajar 9 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Variabel yang digunakan dalam penghitungan HLS adalah partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur. Formula yang digunakan untuk menghitung HLS yaitu :

$$EYS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \quad (1)$$

dimana,

- EYS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
 E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
 P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t
 i = Usia ($a, a+1, \dots, n$).

3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcasing power parity*). Dalam penghitungan standar hidup layak digunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (2)$$

PPP_j = paritas daya beli di wilayah j

p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ij} = harga komoditas i di kab/kota j

m = jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Penyusunan Indeks IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \quad (3)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad (4)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \quad (5)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (6)$$

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})} \quad (7)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel Lampiran 4. Selanjutnya IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari ketiga indeks tersebut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (8)$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$

3. Kelompok “sedang”: $60 \leq \text{IPM} < 70$
4. Kelompok “rendah”: $\text{IPM} < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$r = \left[\frac{\text{IPM}_n - \text{IPM}_{n-1}}{\text{IPM}_{n-1}} \right] \times 100\% \quad (9)$$

Keterangan:

r = Pertumbuhan IPM

IPM_n = IPM tahun ke- n

IPM_{n-1} = IPM tahun ke- $(n-1)$

**STATUS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN
PURWOREJO**

<https://purwokab.go.id>

Status Pembangunan Manusia

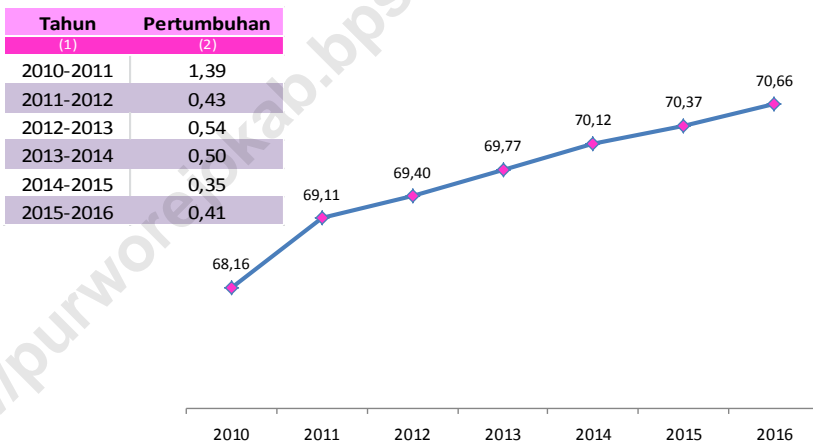
Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kabupaten Purworejo tahun 2016 sebesar 70,66. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir. Saat ini, angka harapan hidup saat lahir di Kabupaten Purworejo sudah mencapai 74,14 tahun dengan kata lain harapan hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 74,14 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 7,66 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VII, hampir menyelesaikan kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,05 tahun atau telah tamat SMA dan mencapai semester 2 di perguruan tinggi. Tidak kalah penting dari dua dimensi diatas, standar hidup layak Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai Rp 9.497.000 per kapita per tahun.

Gambar 2.1. IPM Kabupaten Purworejo dan Komponen, 2016



BPS sudah melakukan penghitungan IPM Kabupaten Purworejo sampai tahun 2016. Pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo memperlihatkan perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, capaian IPM di Kabupaten Purworejo sudah mencapai 70,66. Angka ini meningkat 0,29 poin dari tahun 2015 dengan capaian sebesar 70,37. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Purworejo. Jika dilihat dari trennya, IPM yang merupakan salah satu alat ukur pembangunan manusia mengalami kenaikan. Dalam enam tahun saja, terjadi kenaikan IPM hingga 2,50 poin.

Gambar 2.2. Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pertumbuhan IPM pada periode 2010-2011 di Kabupaten Purworejo merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode ini, IPM Kabupaten Purworejo berhasil tumbuh sebesar 1,39 persen.

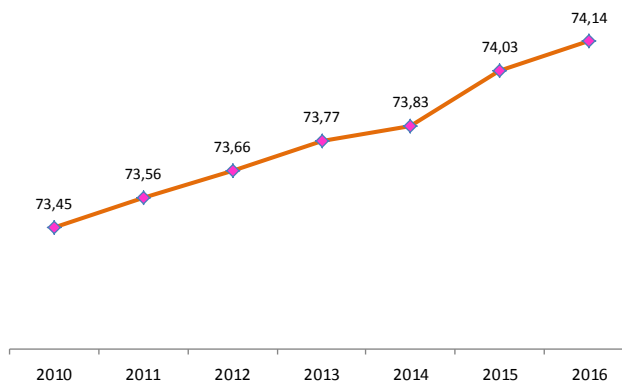
Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

IPM terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadikan status pembangunan manusia Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 masuk dalam kelompok “tinggi”. Status pembangunan manusia yang sudah berada dalam kelompok “tinggi” telah dicapai Kabupaten Purworejo sejak tahun 2014. Melihat capaian sejak tahun 2014 hingga 2016, peluang Kabupaten Purworejo untuk tetap berada dalam kategori tinggi pada tahun-tahun mendatang sangat besar.

“Derajat Kesehatan Kabupaten Purworejo Semakin Meningkat”

Gambar 2.3. Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Purworejo, 2010-2016 (Tahun)



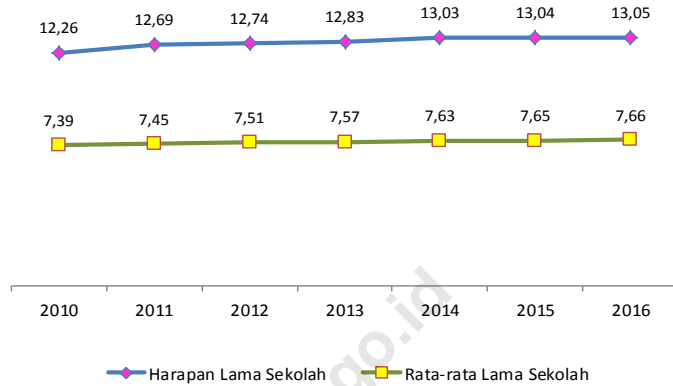
Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari tiga dimensi pembentuk IPM, Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-2016 cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan harapan hidup bagi bayi yang baru lahir semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

“Indikator Pendidikan yang Terus Tumbuh”

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2.4. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Purworejo, 2010-2016 (Tahun)



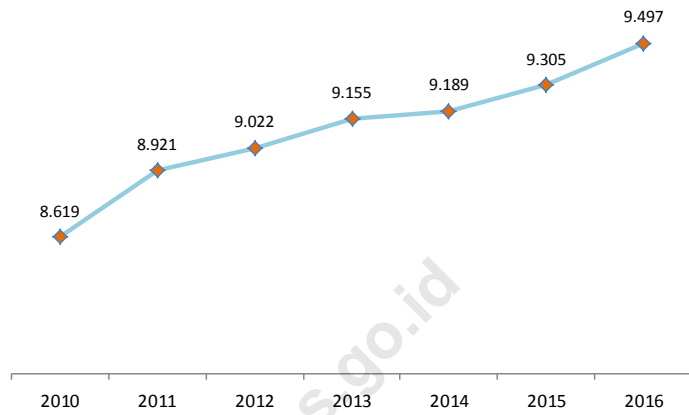
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010 hingga 2016. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 1,07 persen per tahun selama tahun 2010-2016. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 0,61 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

“Standar Hidup Layak yang Makin Membaik”

Standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 6 tahun terakhir, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo per tahun meningkat sebesar 1,69 persen . Jika pada tahun 2010 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 8,62 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2016 sudah mencapai 9,49 juta rupiah per tahun. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antardaerah (pengeluaran perkapita disesuaikan).

Gambar 2.5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Purworejo, 2010-2016 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik

<https://purworejokab.bps.go.id>

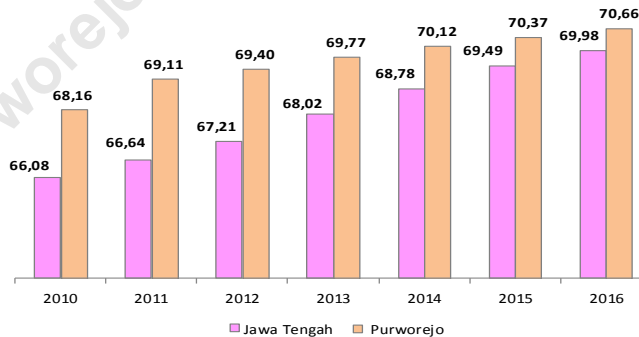
**PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN
PURWOREJO**

Bab 3.

Pencapaian Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo cukup sejalan dengan pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Selama periode enam tahun terakhir, capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo menduduki peringkat sekitar 13 hingga 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. IPM Kabupaten Purworejo selama periode yang sama selalu lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah. IPM Jawa Tengah masih tetap berada pada status “sedang”, sedangkan IPM Kabupaten Purworejo mulai menempati status “tinggi” sejak tahun 2014-2016.

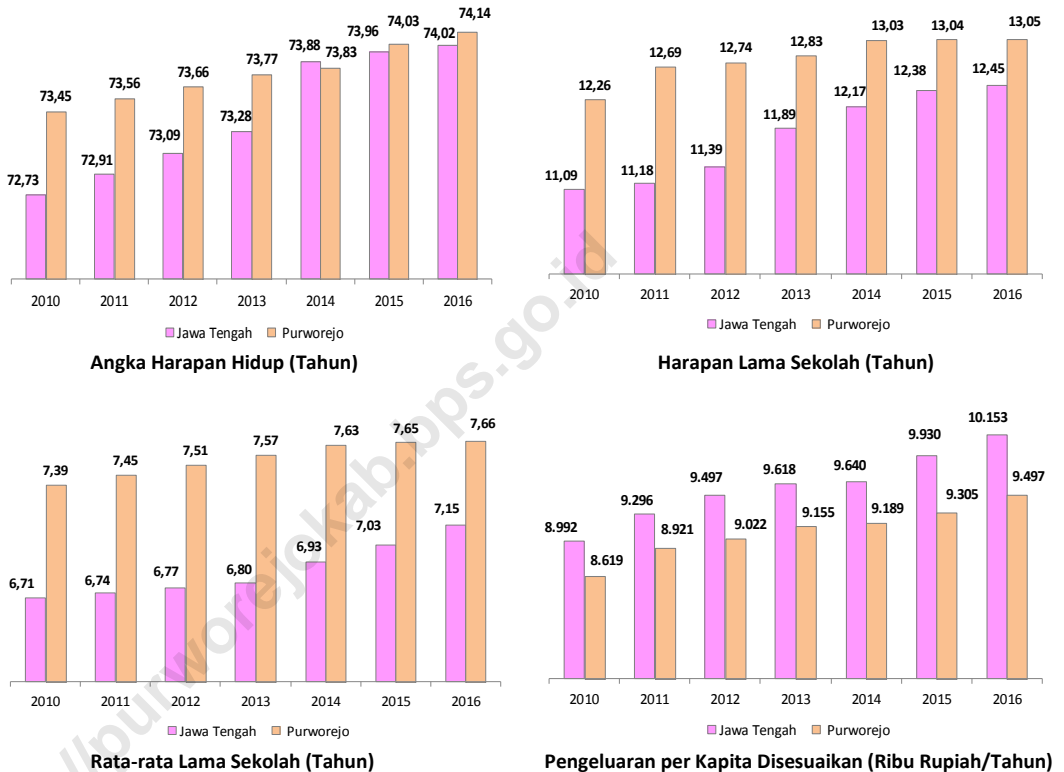
Gambar 3.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

IPM Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 mencapai 70,66. Capaian ini menjadikan Kabupaten Purworejo berada pada peringkat IPM ke-14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sementara itu, IPM Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai 69,98 dan menduduki peringkat ke-13 dari 34 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IPM Kabupaten Purworejo 0,68 point lebih tinggi dibandingkan IPM Jawa Tengah.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Mengamati keempat indikator pembentuk IPM di Kabupaten Purworejo, beberapa indikator sudah berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan indikator IPM Jawa Tengah. Sejak kurun waktu 2010-2016, indikator Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Purworejo selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah. Akan tetapi, indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Purworejo selalu lebih rendah daripada pengeluaran per kapita Jawa Tengah.

Jika dilihat dari trennya, IPM Kabupaten Purworejo yang merupakan salah satu alat ukur pembangunan manusia mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan IPM Jawa Tengah. Meskipun sama-sama mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah tumbuhnya IPM Jawa Tengah. Selama enam tahun terakhir, IPM Kabupaten Purworejo tumbuh 2,50 persen sedangkan IPM Jawa Tengah mampu tumbuh 3,90 persen. Jika dilihat pertumbuhan IPM setiap tahunnya, pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo masih berada pada kisaran 0,2 hingga 0,3 persen, hanya pertumbuhan pada tahun 2011 yang mencapai lebih dari 0,9 persen. Sementara itu, pada periode yang sama, IPM Jawa Tengah selalu tumbuh pada kisaran lebih dari 0,4 persen bahkan di tahun 2013 mampu tumbuh sebesar 0,81 persen.

<https://purworejokab.bps.go.id>

KESENJANGAN ANTARWILAYAH EKS KARESIDENAN KEDU

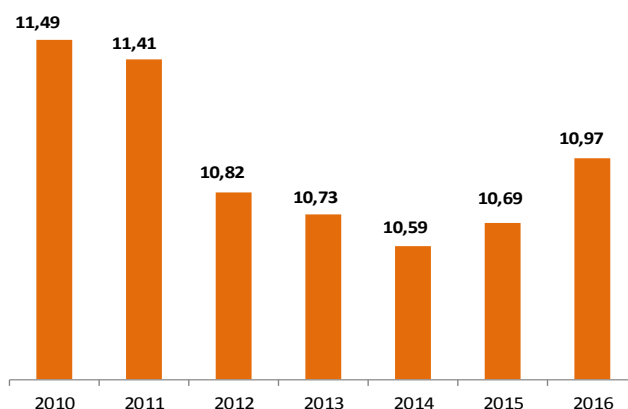
Kesenjangan Antarwilayah Eks Karesidenan Kedu

Kesenjangan Pembangunan Manusia

Karesidenan adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi. Dalam satu karesidenan terdiri dari beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Eks Karesidenan Kedu, yang meliputi Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang.

Selama kurun waktu enam tahun, kesenjangan pembangunan antar wilayah Eks Karesidenan Kedu berada pada angka 10 hingga 11, yaitu dengan kisaran antara 10,59 hingga 11,49. Kesenjangan di tingkat wilayah Eks Karesidenan Kedu selama enam tahun terakhir terjadi antara Kota Magelang (tertinggi) dan Kabupaten Wonosobo (terendah).

Gambar 4.1 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

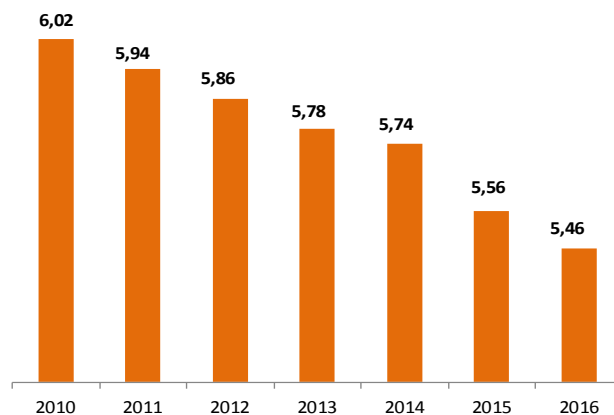
Perkembangan selisih IPM 6 kabupaten/kota wilayah Eks Karesidenan Kedu selama periode enam tahun terakhir cenderung mengalami penurunan walaupun pada tahun 2015 hingga 2016 kembali mengalami peningkatan. Namun demikian, secara umum kesenjangan IPM dari 6 kabupaten/kota tersebut cenderung mengecil dan berada pada angka 10.

Kesenjangan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat wilayah Eks Karesidenan Kedu yang semakin membaik, kesenjangan kesehatan antarwilayah pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara AHH tertinggi dan AHH terendah.

Pada tahun 2016, kesenjangan AHH antar kabupaten/kota Eks Karesidenan Kedu sebesar 5,46. Kesenjangan ini masih terjadi antara Kota Megelang (tertinggi) dan Kabupaten Wonosobo (terendah).

Gambar 4.2 Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016

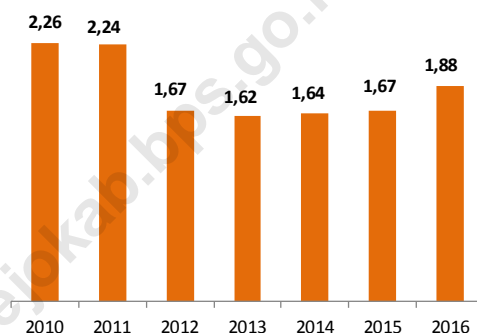


Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan Pendidikan

Sejalan dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2010-2016, kualitas pendidikan di wilayah Eks Karesidenan Kedu juga menunjukkan perkembangan yang baik. Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar 4.3 Perkembangan Selisih EYS Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016

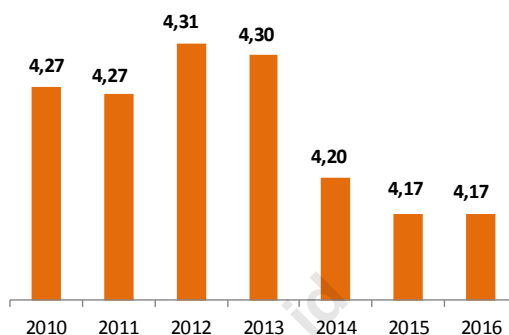


Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah di wilayah Eks Karesidenan Kedu semakin membaik. Selisihnya kian mengecil sejak 2010 hingga 2016, yang berarti bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah makin merata.

Kesenjangan angka harapan lama sekolah di tingkat Eks Karesidenan Kedu terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Magelang dengan Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2016, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Magelang dapat berpotensi menempuh pendidikan selama 13,55 tahun. Pada tahun yang sama, penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Wonosobo berpotensi menempuh pendidikan selama 11,67 tahun.

Gambar 4.4 Perkembangan Selisih MYS Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

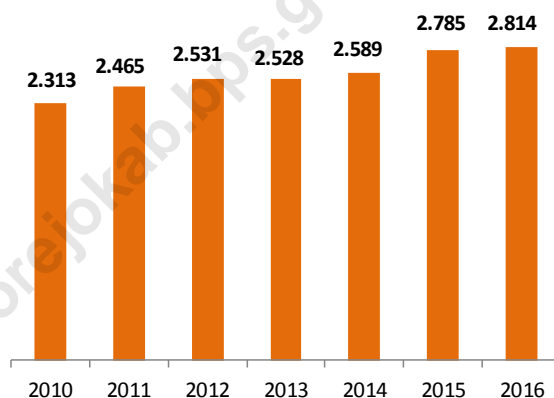
Pola berbeda justru terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah. Selama 6 tahun terakhir, kesenjangan yang terjadi antara wilayah Eks Karesidenan Kedu dengan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah cenderung stagnan. Hal ini mengindikasikan, perubahan pendidikan di wilayah Eks Karesidenan Kedu kurang menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Seperti halnya kesenjangan angka harapan lama sekolah, kesenjangan rata-rata lama sekolah di Eks Karesidenan Kedu juga diakibatkan perbedaan capaian antara Kota Magelang dengan Kabupaten Wonosobo. Perbedaan antara kedua kabupaten/kota relatif stagnan selama enam tahun terakhir. Kesenjangan antara kedua kabupaten/kota tersebut mencapai 4,17 pada tahun 2016. Pada tahun 2016, rata-rata penduduk Kota Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,29 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Wonosobo hanya menempuh pendidikan selama 6,12 tahun.

Kesenjangan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Selama kurun waktu 2010 hingga 2016, pengeluaran per kapita kabupaten/kota Eks Karesidenan Kedu terus meningkat. Akan tetapi, masih terjadi kesenjangan antarwilayah.

Gambar 4.5 Perkembangan Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tertinggi dengan Terendah, 2010-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan pengeluaran per kapita antarwilayah Eks Karesidenan Kedu cenderung semakin meningkat selama enam tahun terakhir. Kesenjangan tersebut akibat perbedaan capaian antara Kota Magelang dengan Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2010, kesenjangan antara Kota Magelang dengan Kabupaten Kebumen hanya 2,3 juta rupiah. Kesenjangan pengeluaran per kapita antara kedua kabupaten/kota kian melebar hingga mencapai 2,8 juta rupiah pada tahun 2016.

KESIMPULAN

<https://purworejokab.bptspgo.id>

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo, diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya :

- Tren pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi di tahun 2016. Capaian IPM Indonesia pada tahun 2016 adalah 70,66 dengan pertumbuhan sebesar 0,41 persen dari tahun 2015.
- Peningkatan terjadi pada seluruh komponen IPM yaitu ;
 1. Komponen kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup menjadi 74,14 di tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,03 tahun (tumbuh 0,15 persen).
 2. Komponen pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi 13,05 tahun (tumbuh 0,07 persen) dan rata-rata lama sekolah menjadi 7,65 tahun (tumbuh 0,13 persen) dibanding tahun 2015.
 3. Komponen ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita per tahun menjadi 9,497 juta pada tahun 2016 (tumbuh 2,06 persen) dibanding tahun 2015.
- Capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo tahun 2016 menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- IPM Kabupaten Purworejo menempati status “tinggi” sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, sedangkan IPM Jawa Tengah masih menempati status “sedang”.

LAMPIRAN

<https://purworejokab.go.id>

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2016

Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)	EYS (Tahun)	MYS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah per Tahun)	IPM	Pertumbuhan (%)
Cilacap	73,11	12,29	6,90	9.677	68,60	1,22
Banyumas	73,23	12,58	7,39	10.554	70,49	0,86
Purbalingga	72,86	11,93	6,86	9.159	67,48	0,67
Banjarnegara	73,69	11,40	6,26	8.400	65,52	1,22
Kebumen	72,87	12,61	7,05	8.276	67,41	0,81
Purworejo	74,14	13,05	7,66	9.497	70,66	0,41
Wonosobo	71,16	11,67	6,12	9.877	66,19	0,75
Magelang	73,33	12,15	7,40	8.501	67,85	1,07
Bojolali	75,67	12,14	7,17	12.192	72,18	0,61
Klaten	76,59	12,85	8,22	11.227	73,97	0,22
Sukoharjo	77,46	13,79	8,58	10.452	75,06	0,71
Wonogiri	75,88	12,43	6,57	8.589	68,23	0,69
Karanganyar	77,11	13,64	8,49	10.722	74,90	0,86
Sragen	75,43	12,30	6,87	11.688	71,43	0,46
Grobogan	74,37	12,26	6,62	9.487	68,52	0,69
Blora	73,88	11,92	6,18	8.846	66,61	0,59
Rembang	74,27	12,03	6,93	9.453	68,60	0,62
Pati	75,69	11,92	6,83	9.548	69,03	0,76
Kudus	76,43	13,19	7,85	10.348	72,94	0,30
Jepara	75,67	12,28	7,32	9.695	70,25	0,33
Demak	75,27	12,44	7,46	9.377	70,10	0,50
Semarang	75,54	12,83	7,48	11.102	72,40	0,71
Temanggung	75,39	12,06	6,55	8.593	67,60	0,79
Kendal	74,20	12,68	6,65	10.631	70,11	0,78
Batang	74,46	11,51	6,42	8.568	66,38	1,41
Pekalongan	73,41	12,15	6,56	9.300	67,71	0,46
Pemalang	72,87	11,87	6,05	7.447	64,17	0,74
Tegal	71,02	12,01	6,54	8.709	65,84	1,23
Brebes	68,41	11,37	6,17	9.148	63,98	1,27
Kota Magelang	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16	1,01
Kota Surakarta	77,03	14,50	10,37	13.900	80,76	0,77
Kota Salatiga	76,87	14,98	9,82	14.811	81,14	0,22
Kota Semarang	77,21	14,70	10,49	13.909	81,19	1,20
Kota Pekalongan	74,15	12,77	8,29	11.721	73,32	0,87
Kota Tegal	74,18	12,88	8,28	11.849	73,55	0,81
JAWA TENGAH	74,02	12,45	7,15	10.153	69,98	0,71

**Pengeluaran per Kapita konstan 2012 dan disesuaikan dengan PPP.*

Lampiran 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2010-2016

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cilacap	64,18	64,73	65,72	66,80	67,25	67,77	68,60
Banyumas	66,87	67,45	68,06	68,55	69,25	69,89	70,49
Purbalingga	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23	67,03	67,48
Banjarnegara	60,70	61,58	62,29	62,84	63,15	64,73	65,52
Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67	66,87	67,41
Purworejo	68,16	69,11	69,40	69,77	70,12	70,37	70,66
Wonosobo	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20	65,70	66,19
Magelang	63,28	64,16	64,75	65,86	66,35	67,13	67,85
Boyolali	68,76	69,14	69,51	69,81	70,34	71,74	72,18
Klaten	70,76	71,16	71,71	72,42	73,19	73,81	73,97
Sukoharjo	71,53	72,34	72,81	73,22	73,76	74,53	75,06
Wonogiri	63,90	64,75	65,75	66,40	66,77	67,76	68,23
Karanganyar	70,31	71,00	72,26	73,33	73,89	74,26	74,90
Sragen	67,67	68,12	68,91	69,95	70,52	71,10	71,43
Grobogan	64,56	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05	68,52
Blora	63,02	63,88	64,70	65,37	65,84	66,22	66,61
Rembang	64,53	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18	68,60
Pati	65,13	65,71	66,13	66,47	66,99	68,51	69,03
Kudus	69,22	69,89	70,57	71,58	72,00	72,72	72,94
Jejara	66,76	67,63	68,45	69,11	69,61	70,02	70,25
Demak	66,02	66,84	67,55	68,38	68,95	69,75	70,10
Semarang	69,58	70,35	70,88	71,29	71,65	71,89	72,40
Temanggung	63,08	64,14	64,91	65,52	65,97	67,07	67,60
Kendal	66,23	66,96	67,55	67,98	68,46	69,57	70,11
Batang	61,64	62,59	63,09	63,60	64,07	65,46	66,38
Pekalongan	63,75	64,72	65,33	66,26	66,98	67,40	67,71
Pemalang	58,64	59,66	60,78	61,81	62,35	63,70	64,17
Tegal	61,14	61,97	62,67	63,50	64,10	65,04	65,84
Brebes	59,49	60,51	60,92	61,87	62,55	63,18	63,98
Kota Magelang	73,99	74,47	75,00	75,29	75,79	76,39	77,16
Kota Surakarta	77,45	78,00	78,44	78,89	79,34	80,14	80,76
Kota Salatiga	78,35	78,76	79,10	79,37	79,98	80,96	81,14
Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23	81,19
Kota Pekalongan	68,95	69,54	69,95	70,82	71,53	72,69	73,32
Kota Tegal	69,33	70,03	70,68	71,44	72,20	72,96	73,55
JAWA TENGAH	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98

Lampiran 3. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar
Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Lampiran 4. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara- Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

<https://purworejokab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://purworejokab.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Purworejo**

Jl. Banyuurip, Purworejo. 54171. Telepon : (0275) 321218
Email : bps3306@bps.go.id